



Upaya UNESCO dalam Menekan Angka Buta Huruf di Sudan Selatan dalam Rangka Implementasi SDG

Tiffany Abigail

Universitas Padjadjaran, Indonesia; tiffany21001@mail.unpad.ac.id

Muhammad Arsy Azzumar

Universitas Padjadjaran, Indonesia; muhammad21081@mail.unpad.ac.id

R. Dudy Heryadi

Universitas Padjadjaran, Indonesia; dudy.heryadi@unpad.ac.id

Deasy Silvy Sari

Universitas Padjadjaran, Indonesia; deasy.silvy@unpad.ac.id

| Dikirim: 17-02-2025

| Diterima: 06-03-2025

| Dipublikasikan: 05-05-2025

Keywords

Illiterate,
International
Organization,
South Sudan,
Sustainable
Development
Goals,
UNESCO

ABSTRACT

South Sudan has the highest illiteracy rate in Sub-Saharan Africa. According to UNESCO, South Sudan has the world's third-lowest adult illiteracy rate. This statistic demonstrates that the illiteracy rate in South Sudan is a serious issue. 2.8 million children have dropped out of school owing to a lack of teaching skills, poor facilities, starvation, violence, climate change, early marriage, and a lack of mobility and assistive equipment for students with impairments. This problem urges the government and international organizations to enhance the quality of education in South Sudan by reducing illiteracy as part of the implementation of SDG 4. By using a qualitative approach and literature studies as data collection methods, this article was written to analyze UNESCO's role in reducing illiteracy in South Sudan as part of SDG 4 implementation. To understand and explain that issue, the authors use Sustainable Development Goals 4.6 concept and the international organization concept. Based on this study, the authors found UNESCO is also working to improve the quality of education in South Sudan through various programs. UNESCO's efforts to promote the implementation of SDG 4.6, which focuses on improving literacy and numeracy rates.

Kata Kunci

Iliterasi,
Organisasi
Internasional,
Sudan Selatan,
Sustainable
Development
Goals,
UNESCO

ABSTRAK

Sudan Selatan merupakan negara yang memiliki tingkat iliterasi tertinggi di Sub-Sahara. Menurut UNESCO, Sudan Selatan merupakan negara ke-3 di dunia dengan tingkat angka buta huruf orang dewasa terendah. Data ini membuktikan bahwa angka buta huruf di Sudan Selatan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Tercatat 2,8 juta anak-anak berhenti sekolah disebabkan oleh kurangnya kemampuan guru dalam mengajar, fasilitas yang tidak memadai, kelaparan, konflik, perubahan iklim, pernikahan dini, kurangnya mobilitas dan alat bantu bagi siswa disabilitas. Isu ini mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui usaha menekan angka buta huruf di Sudan Selatan sebagai upaya implementasi SDG 4. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, artikel ini ditulis untuk menganalisis peran UNESCO dalam menekan angka buta huruf di Sudan Selatan sebagai salah satu upaya implementasi SDG 4. Untuk memahami dan menjelaskan isu tersebut, penulis menggunakan konsep Sustainable Development Goals 4.6 dan konsep organisasi internasional. Berdasarkan studi ini, penulis menemukan bahwa UNESCO turut melakukan upaya melalui berbagai agenda dengan tujuan mendorong kualitas pendidikan di Sudan Selatan. Upaya UNESCO mendorong implementasi SDG 4.6 yang memiliki fokus terhadap peningkatan angka literasi dan numerasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kerangka kerja global yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Terdiri dari 17 agenda yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015, SDGs ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Salah satu tujuan utama SDGs adalah pendidikan berkualitas, yang tercermin pada tujuan keempat, *quality education*. Tujuan ini berupaya memastikan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sepanjang hayat bagi setiap individu (UNESCO, 2015). SDG 4 mencakup tujuh target utama dan tiga target tambahan yang berfokus pada kualitas dan kesetaraan di seluruh jenjang pendidikan (Unterhalter, 2019). Salah satu target yang paling penting adalah target 4.6, yang bertujuan memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa dapat mengakses literasi dan numerasi yang memadai (UNESCO, 2017). Dalam upaya mencapai target tersebut, peran UNESCO menjadi sangat sentral. Secara khusus, UNESCO telah mengarahkan kebijakan dan program-program literasi yang berfokus pada negara-negara dengan tantangan pendidikan berat, seperti Sudan Selatan, sehingga menempatkan lembaga ini sebagai aktor utama dalam mengatasi persoalan buta huruf sejak tahap awal perumusan agenda pendidikan SDGs.

Buta huruf menjadi masalah pendidikan global yang mendalam dan mempengaruhi kualitas hidup banyak orang. Di Sudan Selatan, misalnya, tingkat buta huruf menjadi persoalan signifikan, dengan jutaan orang dewasa yang tidak dapat membaca atau menulis (UNESCO, 2008). Berdasarkan data UNESCO, Sudan Selatan adalah salah satu negara dengan tingkat buta huruf tertinggi, di mana hanya 27% orang dewasa yang melek huruf pada tahun 2008. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini, angka melek huruf di negara tersebut belum meningkat secara signifikan (UNESCO, 2008).

Pada tahun 2018, meskipun ada sedikit peningkatan, angka melek huruf di Sudan Selatan hanya mencapai 35% dari total populasi dewasa (UNESCO, 2018), yang berarti sebagian besar orang dewasa masih mengalami buta huruf. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kemiskinan, karena banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya (World Bank, 2015). Selain itu, keterbatasan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil juga memperburuk keadaan, mengingat banyak wilayah yang jauh dari pusat kota dan memiliki infrastruktur pendidikan yang sangat terbatas (World Bank, 2015). Anak-anak di daerah tersebut sering kali tidak memiliki akses ke sekolah atau harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah terdekat, sehingga menjadi penghambat untuk mendapatkan pendidikan dasar. Dampak dari tingginya angka buta huruf ini sangat besar, karena orang yang tidak melek huruf cenderung kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki akses terbatas terhadap informasi yang diperlukan untuk perkembangan diri.

Untuk mengatasi masalah ini, peran organisasi internasional menjadi sangat penting. Organisasi internasional, yang memiliki tujuan dan mandat untuk kesejahteraan manusia, dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah ini (Barnett & Finnemore, 2004). Melalui SDGs, yang digagas oleh PBB, organisasi internasional didorong untuk berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2030. Angka buta huruf yang tinggi di Afrika, khususnya di Sudan Selatan, memerlukan perhatian serius dan solusi yang tepat. Dalam konteks ini, UNESCO tidak hanya diakui sebagai salah satu organisasi internasional yang aktif, melainkan juga sebagai aktor utama yang secara khusus fokus mengimplementasikan program literasi dan numerasi di Sudan Selatan. Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan, UNESCO telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka buta huruf di Afrika, termasuk di Sudan Selatan (UNESCO, 2017). Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam mengatasi masalah buta huruf di Afrika, serta peran organisasi internasional dalam mendukung pencapaian agenda SDGs, dengan penekanan khusus pada peran strategis UNESCO dalam konteks Sudan Selatan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Hák et al., 2016). Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam *World Charter for Nature* dan kemudian diperluas dalam laporan *Our Common Future*, yang diterbitkan oleh Brundtland Commission pada tahun 1987. Dalam laporan tersebut, Brundtland Commission mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan yang saling terkait.

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada pencapaian keseimbangan antara ketiga dimensi ini agar dapat mendorong kemajuan tanpa mengorbankan ekosistem dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan jangka panjang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan hidup bumi dan masyarakat di masa depan. Konsep ini juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga pembangunan yang terjadi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi mencakup kesejahteraan global (Hák et al., 2016).

Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan besar seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, yang dapat mengancam keseimbangan global (United Nations, 2015). Setiap tujuan SDG ini saling terkait, dan pencapaian satu tujuan seringkali berkontribusi pada pencapaian tujuan lainnya, membentuk sebuah kerangka kerja yang terpadu untuk pembangunan dunia yang lebih berkelanjutan.

Secara khusus, SDG 4 berfokus pada penyediaan pendidikan berkualitas, yang menekankan pendidikan yang inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan karena dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pendidikan juga memberi individu keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan (Hák et al., 2016).

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pencapaian SDG 4 adalah ketimpangan dalam akses pendidikan, yang terutama terlihat di negara-negara berkembang dengan tingkat literasi yang rendah. Ketimpangan ini mencakup hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan individu, serta kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai. Tantangan ini semakin berat bagi komunitas yang terpinggirkan, di mana banyak individu tidak memiliki akses yang setara untuk memperoleh pendidikan formal maupun non-formal (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan upaya pada penyediaan pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk melalui program pendidikan non-formal yang dapat memberikan keterampilan praktis dan relevansi lokal.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*, ESD) memainkan peran penting dalam pencapaian SDGs secara keseluruhan. ESD bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan individu agar mampu mengatasi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Program ESD tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga meliputi pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan

lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hák et al., 2016).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, fenomena buta huruf merupakan salah satu tantangan nyata yang menghambat pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Tingginya angka buta huruf di Sudan Selatan mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat serta kelangsungan pembangunan jangka panjang. Di sinilah peran UNESCO menjadi sangat krusial, mengingat organisasi ini telah mengimplementasikan program-program literasi dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDG 4.

UNESCO telah mengembangkan berbagai inisiatif strategis untuk menekan angka buta huruf di Sudan Selatan melalui pendekatan komprehensif, yang tidak hanya meningkatkan akses pendidikan formal dan non-formal, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memperoleh keterampilan literasi yang memadai. Pendekatan ini mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, karena pendidikan berkualitas merupakan landasan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, upaya UNESCO di Sudan Selatan merupakan implementasi konkret dari konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pendidikan menjadi instrumen vital untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan.

Organisasi Internasional

Organisasi internasional (OI) merupakan bentuk kerja sama antarnegara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat global. Archer (2001) mengemukakan bahwa organisasi internasional adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani isu-isu yang melintasi batas negara dan memerlukan aksi kolektif, seperti perdamaian, keamanan, dan masalah sosial-ekonomi. Dalam pandangan Archer, OI berfungsi tidak hanya sebagai instrumen diplomasi, tetapi juga sebagai arena bagi negara-negara untuk berdiplomasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan global. OI dapat bertindak sebagai aktor independen yang memfasilitasi penyelesaian masalah yang mempengaruhi banyak negara, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial.

Keberadaan OI memberikan banyak manfaat bagi negara-negara anggota, terutama dalam menghadapi isu-isu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Melalui OI, negara-negara anggota dapat berkolaborasi dalam mengelola sumber daya bersama, menyusun kebijakan global, dan memecahkan masalah yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Sebagai contoh, masalah perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam memerlukan koordinasi internasional yang kuat. OI juga berperan sebagai platform yang memungkinkan pertukaran informasi, berbagi praktik terbaik, dan penyusunan kebijakan yang saling mendukung antarnegara.

OI juga berfungsi dalam memfasilitasi diplomasi multilateral, yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan yang beragam untuk duduk bersama dan merundingkan solusi untuk tantangan global. Dalam hal ini, organisasi internasional berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan global. Pembentukan organisasi internasional pertama kali dimulai dengan Konferensi Perdamaian Versailles pada tahun 1919, yang berfungsi sebagai forum bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah global seperti perdamaian dan keamanan internasional (Archer, 2001).

Secara lebih spesifik, OI berperan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas negara, seperti penanggulangan bencana alam, pengelolaan perubahan iklim, dan pengurangan kemiskinan. Dalam konteks ini, organisasi internasional bertindak sebagai penghubung antara negara-negara yang memiliki latar belakang politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda, untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterima bersama demi mencapai tujuan global yang lebih besar (Barnett & Finnemore, 2004).

Dalam konteks fenomena buta huruf di Sudan Selatan, konsep peran organisasi internasional menjadi sangat relevan. UNESCO, sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada bidang pendidikan, telah menerapkan prinsip-prinsip kerja sama antarnegara untuk mengatasi tantangan global, dalam hal ini, tingkat buta huruf yang masih tinggi. Pendekatan kolaboratif yang diusung oleh UNESCO mencerminkan fungsi organisasi internasional sebagaimana dijelaskan oleh Archer dan Barnett & Finnemore, yakni sebagai fasilitator kerja sama lintas batas negara untuk menyusun kebijakan dan program yang dapat menjawab isu-isu yang kompleks secara kolektif.

Keterlibatan UNESCO di Sudan Selatan merupakan contoh konkret bagaimana organisasi internasional dapat mengintegrasikan upaya-upaya internasional dalam mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan secara nasional. Melalui program literasi dan pendidikan, UNESCO bekerja sama dengan pemerintah setempat, lembaga donor, dan mitra internasional untuk meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka buta huruf. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peran UNESCO dalam menekan angka buta huruf di Sudan Selatan mengilustrasikan penerapan konsep kerja sama antarnegara melalui organisasi internasional dalam menyelesaikan tantangan pendidikan dan pembangunan global.

METODE RISET

Artikel ini merupakan luaran penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks, proses, dan dinamika peran UNESCO dalam mengurangi angka buta huruf di Sudan Selatan. Unit analisis dari penelitian ini adalah angka buta huruf di Sudan Selatan. Unit eksplanasinya adalah peran UNESCO dalam mengupayakan Implementasi SDG 4. Data yang dikumpulkan, dikelompokkan ke dalam tema: i) kualitas Pendidikan di Sudan Selatan, dan ii) Upaya UNESCO dalam menekan angka buta huruf di Sudan Selatan.

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data studi literatur dengan sumber berupa data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis tematik sesuai dengan tema data. Validitas yang dilakukan adalah triangulasi sumber data, di mana peneliti melakukan pemeriksaan dari berbagai dokumen dan data-data dari internet yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Pendidikan di Sudan Selatan

Poin 4.6 pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki tekad yang sangat penting, yakni memastikan bahwa seluruh kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mencapai kemampuan literasi dan numerasi pada tahun 2030. Kemampuan literasi dan numerasi ini bukan hanya sekadar dasar membaca dan berhitung, tetapi juga menjadi landasan vital bagi perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Melalui kemampuan tersebut, transfer ilmu pengetahuan dapat berjalan lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan demikian, literasi dan numerasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pembekalan keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian dan kehidupan sosial.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama rendahnya tingkat literasi di negara berkembang. Sudan Selatan, yang baru merdeka pada tahun 2011, menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan sektor pendidikan. Baik faktor internal, seperti kebijakan pendidikan dan sumber daya manusia, maupun faktor eksternal, seperti konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan, turut memperburuk situasi pendidikan di negara ini.

Di Sudan Selatan, pendidikan terhambat oleh faktor struktural dan sosial yang kompleks. Misalnya, lebih dari 2,8 juta anak terpaksa berhenti sekolah, sementara mayoritas guru mengajar tanpa pelatihan formal. Bahkan, 63% guru tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur yang rusak dan fasilitas yang tidak memadai, sehingga banyak sekolah beroperasi dalam kondisi darurat, seperti di bawah pohon atau di bangunan semi-permanen. Tantangan bahasa juga signifikan, mengingat bahasa Inggris sebagai pengantar belum dikuasai dengan baik oleh banyak guru, yang mengganggu efektivitas pengajaran (Skårås, Carsillo, & Breidlid, 2019). *Data terbaru dari UNESCO Institute for Statistics (2020) mengungkapkan bahwa tingkat literasi dewasa di Sudan Selatan masih berada di bawah 35%, menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan belum optimal. Laporan World Bank (2021) juga mencatat adanya peningkatan partisipasi pendidikan, namun kualitas dan kualifikasi guru masih menjadi tantangan signifikan.*

Kondisi kemiskinan dan kelaparan yang melanda sekitar 4,5 juta anak di Sudan Selatan turut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk terus bersekolah. Kekurangan gizi dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi membuat banyak anak tidak dapat fokus pada pelajaran. Selain itu, masalah sosial seperti pernikahan dini dan keterbatasan mobilitas bagi siswa disabilitas semakin memperburuk kondisi pendidikan (World Vision, 2022). *Menurut data UNICEF (2021), hambatan akses pendidikan dan angka putus sekolah masih tinggi, meskipun terdapat upaya-upaya perbaikan.*

Di tengah situasi yang sulit ini, Sudan Selatan perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target SDG 4.6. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dapat didukung dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

Pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan diwujudkan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Sudan Selatan, misalnya, telah meluncurkan beberapa inisiatif dalam kerangka *General Education Act 2012*, yang bertujuan memberantas buta huruf, menyediakan akses pendidikan yang setara, dan mempromosikan kesetaraan gender. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas, sejalan dengan pencapaian SDG lainnya (*General Education Act, 2012*).

Salah satu langkah signifikan adalah peluncuran *South Sudan National Curriculum Framework* pada tahun 2015. Kerangka kurikulum ini dikembangkan dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, perdamaian, toleransi, dan integritas. Kurikulum tersebut bertujuan memberikan pembelajaran yang relevan dan mutakhir, dengan penekanan pada literasi dan numerasi sebagai dasar utama di semua jenjang pendidikan. Upaya ini tidak hanya mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik, tetapi juga individu yang produktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya (Maphalala, 2015). Kurikulum ini juga berkomitmen meningkatkan melek huruf di kalangan siswa, terutama melalui pengajaran literasi dan numerasi di tingkat dasar. Di kelas awal, pengajaran dilakukan dalam bahasa setempat untuk memastikan keterjangkauan dan pemahaman yang lebih baik, sedangkan di tingkat yang lebih tinggi, pengajaran dilanjutkan dalam bahasa Inggris dengan pendekatan yang lebih formal dan analitis. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan siap menghadapi tantangan global.

Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan pendidikan inklusif dan berkualitas, Sudan Selatan harus melibatkan semua pemangku kepentingan—pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan negara-negara besar dan lembaga internasional seperti UNESCO, serta lembaga pendidikan global, dapat menyediakan dukungan teknis dan finansial yang sangat dibutuhkan. Keterlibatan sektor swasta juga penting, misalnya dalam memperbaiki infrastruktur sekolah dan memberikan pelatihan bagi guru.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya akan mendongkrak literasi dan numerasi, tetapi juga menciptakan dampak luas, seperti peningkatan taraf hidup, kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan, dan pemeliharaan perdamaian. Misalnya, dengan meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi akan tumbuh, berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan komunitas (Skårås, Carsillo, & Breidlid, 2019). Oleh karena itu, meskipun Sudan Selatan menghadapi banyak tantangan, terdapat peluang besar untuk mencapai target SDG 4.6 melalui pendekatan berorientasi keberlanjutan. Melalui kerja sama internasional, kebijakan pendidikan inovatif, serta komitmen pada prinsip-prinsip SDG 4.6, Sudan Selatan dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dengan literasi dan numerasi yang lebih baik sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya UNESCO sebagai Organisasi Internasional dalam Menekan Angka Buta Huruf di Sudan Selatan

Tingginya angka buta huruf yang tidak berubah signifikan selama beberapa tahun mendorong berbagai aktor, termasuk UNESCO, untuk berkontribusi mengatasi masalah tersebut. Sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB, UNESCO memiliki peran strategis dalam membantu negara anggotanya mencapai pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas, sekaligus membangun fondasi kokoh bagi sistem pendidikan Sudan Selatan agar dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang (Impact Pool, 2022).

UNESCO tidak hanya berperan sebagai penasihat kebijakan, tetapi juga terlibat langsung dalam penyusunan dan implementasi program pendidikan yang mengurangi tingkat buta huruf, khususnya di kalangan kelompok marjinal. Data UNICEF (2021) menunjukkan bahwa 50% anak usia 5 tahun tidak mengikuti pendidikan pra-sekolah, 75% anak usia 6 tahun dan 59% anak usia 7 tahun tidak mendapatkan pendidikan formal, dengan sekitar 2,2 juta anak tidak bersekolah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. **Buruh Anak:** Di banyak wilayah di Sudan Selatan, mayoritas anak-anak OOSC teridentifikasi sebagai buruh anak. Bahkan di golongan anak usia 10-15 tahun, lebih dari 86% yang mendapat pendidikan formal juga bekerja sebagai buruh anak, yang tentunya mengganggu konsentrasi dalam belajar.
2. **Anak Terlantar Akibat Konflik:** Konflik militer yang berkepanjangan di Sudan Selatan menyebabkan banyak masyarakat, termasuk anak-anak, menjadi pengungsi internal. Data menunjukkan bahwa 60% dari anak yang dipindahkan akibat konflik adalah anak-anak yang tentunya memperburuk upaya pencapaian pendidikan bagi mereka.
3. **Nikah Dini bagi Perempuan:** Sudan Selatan tercatat memiliki tingkat partisipasi pendidikan dasar anak perempuan terendah di kawasan Sub-Sahara Afrika, sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat pernikahan dini yang menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan.
4. **Pasukan Militer Anak:** Puluhan ribu anak telah direkrut menjadi bagian dari pasukan militer, yang tentunya mengurangi akses mereka terhadap pendidikan formal.
5. **Anak-Anak dengan Disabilitas:** Dampak dari kekurangan gizi, konflik militer, serta faktor lainnya menyebabkan banyak anak-anak dengan disabilitas. Ini memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih fokus dan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kelompok marjinal ini, UNESCO berupaya membantu pemerintah Sudan Selatan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dalam sektor pendidikan. Melalui dukungan teknis, UNESCO membantu menyusun reformasi pendidikan, menyelaraskan kebijakan, dan mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan lokal. Selain memberikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional, UNESCO juga

mengembangkan model pendidikan alternatif, seperti pembelajaran berbasis komunitas dan pendidikan jarak jauh untuk menjangkau anak-anak yang terpinggirkan oleh faktor geografis atau sosial (Impact Pool, 2022). Beberapa rekomendasi utama yang dapat diambil adalah:

1. Peran UNESCO sebagai Penasihat dalam Reformasi Pendidikan: UNESCO harus terus memainkan peran sebagai penasihat dalam mendukung otoritas pendidikan nasional untuk mengarahkan proses pengembangan dan reformasi sektor pendidikan di Sudan Selatan. UNESCO dapat memberikan bantuan teknis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati secara global.
2. Peningkatan Kepemimpinan Pemerintah dalam Sektor Pendidikan: Otoritas pendidikan nasional harus memiliki peran yang lebih kuat untuk memastikan kepemimpinan yang jelas dalam sektor pendidikan. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengoptimalkan kolaborasi dengan aktor-aktor pendidikan lainnya, seperti lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Rencana strategis yang jelas dan realistis akan memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Sudan Selatan.
3. Penyediaan Akses yang Lebih Luas: UNESCO mendukung perluasan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan, seperti anak-anak OOSC, anak-anak dengan disabilitas, dan perempuan yang terkena dampak nikah dini. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menyediakan pendidikan alternatif yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran berbasis komunitas atau pendidikan jarak jauh, yang dapat menjangkau anak-anak yang terhalang oleh faktor geografis atau sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, UNESCO berupaya mengurangi ketimpangan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sudan Selatan, sehingga angka buta huruf dapat ditekan secara signifikan dan mendukung pencapaian SDG 4 secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4.6 berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi bagi seluruh umat manusia pada tahun 2030. Kemampuan literasi dan numerasi menjadi indikator utama kemajuan atau perkembangan suatu negara, karena keduanya merupakan dasar penyebaran ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi sosial-ekonomi masyarakat. Sudan Selatan, sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan terendah di kawasan Sub-Sahara Afrika, menghadapi tantangan besar dalam mencapai target ini. Data menunjukkan bahwa sekitar 2,8 juta anak-anak di Sudan Selatan berhenti sekolah, dengan tingkat melek huruf hanya 27%, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik, kemiskinan, dan kesenjangan dalam distribusi pendidikan (Briefing Note UNICEF, 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Sudan Selatan merumuskan *General Education Act* 2012 dan *South Sudan National Curriculum Framework*, yang berfokus pada pemberantasan buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan, dengan tujuan meningkatkan literasi sebagai bagian dari pencapaian SDG 4.6 pada 2030.

UNESCO, sebagai organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berperan penting dalam mendukung implementasi SDG 4, khususnya poin 4.6 di Sudan Selatan. UNESCO memberikan kontribusi besar dengan mendorong peningkatan literasi dan numerasi melalui berbagai program dan agenda yang ditargetkan pada kelompok marjinal. Sebagai badan PBB yang fokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, UNESCO membantu Sudan Selatan dalam memperkuat fondasi pendidikan dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berisiko tidak mendapatkan pendidikan sesuai usia mereka, seperti anak-anak yang terlibat dalam pekerja anak, pengungsi akibat konflik, dan anak-anak dengan disabilitas. Dengan pendekatan yang lebih terpersonalisasi, UNESCO berusaha menciptakan agenda pendidikan yang lebih efektif yang sesuai

dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi dan numerasi di negara tersebut.

Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat dalam bidang pendidikan global, UNESCO tidak hanya memberikan dukungan teknis dan kebijakan, tetapi juga mendorong kolaborasi antar aktor internasional dalam memecahkan masalah pendidikan di Sudan Selatan. UNESCO menyadari bahwa pencapaian SDG 4.6 tidak dapat tercapai hanya dengan usaha satu pihak, sehingga organisasi ini menggalang kesadaran internasional tentang pentingnya kerja sama global. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen UNESCO terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi landasan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesetaraan, dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang lebih luas, peningkatan literasi dan numerasi di Sudan Selatan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Sudan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkari, A. (2015). *Education in the Middle East and North Africa. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 210–214. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92149-4>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868921494>
- Archer, C. (2001). *International Organisations* (Third Edition ed.). London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203192276>
- Archer, C. (2015). *International organizations*. Routledge.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aRgcBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=international+organizations&ots=0Mv2bQHA8G&sig=mk5GdgdD3jd_Ths-JS-aLrcgo4E&redir_esc=y#v=onepage&q=international%20organizations&f=false
- Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). *Rules for the world: International organizations in global politics*. Cornell University Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ferguson, T., & Roofe, C. G. (2020). SDG 4 in higher education: *Challenges and opportunities. International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(5), 959-975.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-12-2019-0353/full/html>
- Government of South Sudan. (2012). *General Education Act, 2012*. Government Printer.
- Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators. *Ecological indicators*, 60, 565-573.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15004240>
- Heugh, K. (2007). *Language and literacy issues in South Africa* (Doctoral dissertation, Multilingual matters).
https://www.researchgate.net/publication/291881611_Language_and_literacy_issues_in_South_Africa
- Impact Pool. (2022). *South Sudan education crisis: Challenges and opportunities*. Impact Pool.
<https://www.impactpool.org>
- Jogwu, C. N. (2010). Adult Illiteracy: The Root of African Underdevelopment. *Education*, 130(3).
<https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c43ffd79-b599-4961-ac78-8eabcd7b736%40redis>
- Katila, P., Colfer, C. J. P., De Jong, W., Galloway, G., Pacheco, P., & Winkel, G. (Eds.). (2019). *Sustainable Development Goals*. Cambridge University Press.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=723CDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=sustainable+development+goals&ots=JK_CVu74ZX&sig=t3KO8S-IHoXmVkN-BtKz19ACgyI&redir_esc=y#v=onepage&q=sustainable%20development%20goals&f=false
- Khuluvhe, M. (2021). *Adult illiteracy in South Africa. Pretoria: South African Department of Higher Education and Training*.
<https://www.dhet.gov.za/Planning%20Monitoring%20and%20Evaluation%20Coordination/Fac>

- t%20Sheet%20on%20Adult%20Illiteracy%20in%20South%20Africa%20-%20March%202021.pdf
- Maphalala, T. (2015, October 13) South Sudan Celebrates Its First Comprehensive Curriculum.<https://www.globalpartnership.org/blog/south-sudan-celebrates-its-first-comprehensive-curriculum>
- Ministry of Education, Science and Technology. (n.d.). Curriculum Framework South Sudan. <https://www.curriculumfoundation.org/blog/wp-content/uploads/SS-Curriculum-Framework.pdf>
- Unterhalter, E. (2019). The many meanings of quality education: Politics of targets and indicators in SDG 4. *Global Policy*, 10, 39-51. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12591><https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12591>
- Shanks, G., & Bekmamedova, N. (2018). *Case study research in information systems. Research Methods*, 193–208. doi: 10.1016/B978-0-08-102220-7.00007-8
- Skårås, M., Carsillo, T., & Breidlid, A. (2020). The ethnic/local, the national and the global: Global citizenship education in South Sudan. *British Journal of Educational Studies*, 68(2), 219-239.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- UNESCO. (2008). *Education for all global monitoring report 2008: Education for all by 2015 - Will we make it?* UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187279>
- UNESCO. (2015). *Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205>
- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
- UNESCO. (2017). *Global Education Monitoring Report 2017/18: Accountability in education – Meeting our commitments*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262047>
- UNESCO. (2018). *UIS statistics in brief: Literacy rates*. UNESCO Institute for Statistics. <http://uis.unesco.org/en/topic/literacy>
- UNESCO. (2020, September 15). South Sudan commemorates International Literacy Day (ILD). <https://www.unesco.org/en/articles/south-sudan-commemorates-international-literacy-day-ild>
- UNESCO Institute for Statistics. (2020). *Literacy rates in South Sudan [Data file]*. Retrieved from <http://uis.unesco.org/en/topic/literacy>
- UNICEF. (2020). *The state of the world's children 2020: Children, food and nutrition*. UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children>
- UNICEF. (2021). *Education in South Sudan Briefing Note*. <https://www.unicef.org/southsudan/documents/education-briefing-note>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2015). *South Sudan overview*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview>
- World Bank. (2021). *Education in Sudan: Challenges and opportunities*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/southsudan/education>
- World Vision. (2021). *The Impact of South Sudan's Crises on Education*. https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-06/Education%20-%20South%20Sudan%20Case%20Study%202022_Final_compressed.pdf